ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) , TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 – 2015

Oleh:

DESY NOVIA

13.1.02.01.0066

Dibimbing oleh :

1. Drs. Ec. Sugeng.M.M,.M.Ak,.CA
2. Diah Nurdiawaty,S.E.,M.SA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2017

Artikel Skripsi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Desy Novia
NPM	: 13.1.02.01.0066
Telepun/HP	: 085645736537
Alamat Surel (Email)	: Desyynoviaa@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) , Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Tahun 2013 - 2015
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Ekonomi
Nama Perguruan Tinggi	: UN PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: JL. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tuli merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri,18 Agustus 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Drs. Ec. Sugeng.M.M,.M.Ak,.CA NIDN. 0713026101	Diah Nurdiawaty,S.E,.M.SA NIDN./0728067201	Desy Novia 13.1.02.01.0066

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) , TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 - 2015

DESY NOVIA
13.1.02.01.0066
Ekonomi – Akuntansi
Desyynoviaa@gmail.com
Drs. Ec. Sugeng.M.M,.M.Ak,.CA dan Diah Nurdiawaty,S.E.,M.SA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitan ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa Pemanfaatan belanja modal yang kurang tepat oleh pemerintah daerah, yaitu digunakan untuk membiayai belanja yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) PAD mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal (2) DAU mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal (3) DAK mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal (4) PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu 105 Kabupaten dan Kota dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS for windows versi 23. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan secara simultan PAD,DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

KATA KUNCI : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal.

1. Latar Belakang

Pemerintah Derah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan hal ini berdasarkan Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada era desentralisasi diperlukan alokasi belanja yang lebih besar yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan sarana prasana serta pelayanan khususnya di sektor publik yang lebih baik tidak menutup kemungkinan para investor akan melirik daerah sebagai tempat mereka menanam modal dengan

begitu secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan perekonomian didaerah tersebut.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Pasal 1 ayat 30 bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu. Salah satu asal pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku.

Dalam rangka untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU No. 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah (Tax Assignment), Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing) Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan

keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 dijelaskan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Soleh dan Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Adanya Dana Perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah

Berdasarkan Data Realisasi Anggaran APBD Jawa Timur tahun sebelumnya menyatakan bahwa, Realisasi APBD pada agregat Kabupaten/Kota tahun 2013 memiliki pola yang hampir sama dengan realisasi konsolidasi nasional, di mana terjadi pelampauan realisasi pendapatan dan tidak tercapainya realisasi belanja.

Pada sektor belanja, realisasi APBD pada agregat kabupaten/kota tidak terserap sebesar Rp11,12 triliun. Realisasi belanja yang tidak terserap tersebut paling besar disumbang oleh tidak terealisasinya belanja pegawai dan belanja modal, kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa. Sementara itu, total agregat belanja kabupaten/kota menjadi lebih besar karena pelampauan realisasi Belanja Lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen kabupaten/kota dalam merealisasikan

belanja modal masih kurang optimal, sehingga sekalipun adanya pencapaian pada pelampauan pendapatan, namun pertumbuhan pembangunan di daerah tidak serta merta turut meningkat karena tidak diikuti oleh penggunaan pendapatan tersebut untuk pembangunan di daerah kabupaten/kota masing-masing.

Penyerapan anggaran yang rendah bisa saja terjadi karna banyak hal seperti yang terjadi di Kota Kediri yang tergolong mempunyai PAD cukup tinggi, pembangunan infrastruktur pun dilakukan dimana – dimana, namun terlihat jelas saat ini ada pembangunan infrastruktur yang terhenti yaitu jembatan Brawijaya. Penghentian pembanguan jembatan ini dikarenakan masalah hukum, sedangkan pemerintah setempat setiap tahunnya mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan jembatan tersebut, namun pembangunan tersebut tetap saja tidak bisa dilanjutkan selama proses hukum belum selesai, Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran pemerintah yang rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen kota dalam merealisasikan belanja modal masih kurang optimal, sehingga sekalipun adanya pencapaian pada pelampauan pendapatan, namun pertumbuhan pembangunan di daerah tidak serta merta turut meningkat karena tidak diikuti oleh penggunaan pendapatan tersebut untuk pembangunan di daerah kota.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur karena merupakan provinsi dengan PAD yang cukup besar meskipun terlihat pembangunan yang cukup pesat namun realisasi belanja modal nya kurang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diharapkan dapat memberikan informasi yang besar dalam peningkatan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015".

2.METODE

Populasi dan Sampel

Populasi LRA APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dari tahun 2013 – 2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan. Sampel penelitian diambil dengan kriteria sebagai berikut :

a. Kabupaten dan Kota yang mempublikasikan laporan Realialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 dan 2015.

b. Kabupaten dan Kota yang mencantumkan data mengenai PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Jadi jumlah kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria adalah 35 kabupaten dan kota jadi selama 3 tahun, berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 105 Kabupaten dan Kota Jawa Timur

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekuder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 – 2015 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Untuk menguji hipotesis, variabel-variabel yang akan di teliti perlu diberikan batasan-batasan dan di tentukan indikator-indikatornya. Adapun variabel-variabel tersebut terdiri dari :

Belanja Modal (Y)

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, asset tetap lainnya, dan belanja asset lannya. Dari penjelasan diatas yang mengatur mengenai belanja modal Indikator variabel dapat dirumuskan dengan:

BM = BT+BPM+BGB+BJIJ+BATL+BAL

Keterangan:

BM = Belanja Modal
BT = Belanja Tanah
BPM = Belanja Peralatan dan Mesin
BGB = Belanja Gedung dan Bangunan
BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya
BAL = Belanja Asset Lainnya

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan dengan:

PAD = HPD + HRD + HPKDD + LPADS

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah
HPD = Pajak Daerah
HRD = Retribusi Daerah
PLPD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPADS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah di daerah indonesia.

DAU dapat dihitung dengan cara :

DAU = AD +CF

Keterangan :

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah

CF = Celah Fiskal yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF)

Dana Alokasi Khusus (X3)

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk membantu yang menjadi prioritas nasional.

Dilihat dari pengalokasian dana dapat

DAK = DAKBP + DAKBK + DAKBIJ + DAKBII + DAKBIAM + DAKBIS + DAKBP + DAKBKP + DAKBPP + DAKBLH + DAKBKB + DAKBK + DKBSPP + DAKBP

dihitung dengan :

Keterangan

DAK = Dana Alokasi Khusus

DAKBP = DAK Bidang Pendidikan

DAKBK = DAK Bidang Kesehatan

DAKBIJ =DAK Bidang Infrastruktur Jalan

DAKBII =DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

DAKBIAI = DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

DAKBIS = DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

DAKBIP = DAK Bidang Pertanian

DAKBKP = DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

DAKBPP = DAK Bidang Prasarana Pemerintahan

DAKBLH = DAK Bidang Lingkungan Hidup

DAKBKB = DAK Bidang Keluarga Berencana

DAKBK = DAK Bidang Kehutanan

DAKBSPP = DAK Bidang Sarana dan Prasaran Perdesaan

DAKBP = DAK Bidang Perdagangan

3. HASIL DAN KESIMPULAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dasar penga,bilan keputusan dalam analisis ini adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjukan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1 Grafik Histogram

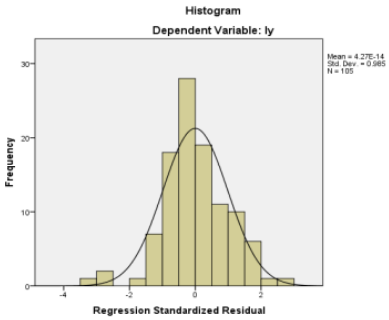

Gambar 2 Grafik Normal P. Plot

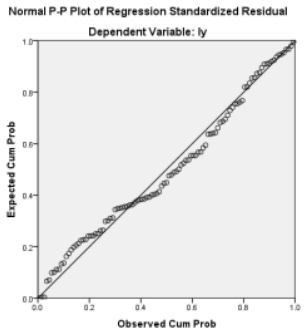

Tabel 1 One – Sample Kolmogorov Smirnov- Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12207553
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.061
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Table 2 Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
lx1	.571	1.752
lx2	.398	2.515
lx3	.576	1.736

a. Dependent Variable: ly

Hasil perhitungan dalam model ini tidak ada multikolinieritas karena telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu keempat variabel independen yang diteliti memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10

Analisis Uji Autokorelasi

Berikut hasil uji Durbin-Watson (DW test) yang nilainya ditunjukkan pada dibawah ini.

Table 3 Uji Autokerelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868[a]	.754	.746	.12388	1.582

a. Predictors: (Constant), lx3, lx1, lx2

b. Dependent Variable: ly

Sumber : SPPS 23

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari Uji autokorelasi. dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi tersebut terdapat gejala autokorelasi dan uji asumsi klasik tidak terpenuhi. Maka dapat digunakan uji *run test*

Hasil uji run test diketahui bahwa nilai signifikansi berada diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4 Uji Run Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-.01587
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	53
Total Cases	105
Number of Runs	48
Z	-1.078
Asymp. Sig. (2-tailed)	.281

a. Median

Uji Heteroskedativitas

Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik Scatterplots

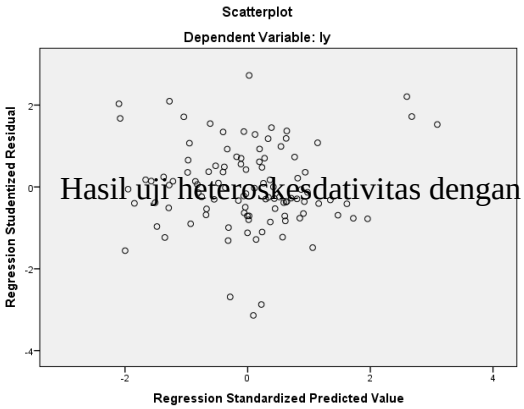

Hasil uji heteroskesdativitas dengan menggun ditunjukkan oleh grafik scatterplotterlihat bahwa titik -titik menyebar secara acak serta tidak menunjukkan pola tertentu, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, sehingga regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal (Y) maka digunakan model regresi

linier berganda (Multiple linier regression method) yangdirumuskan sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta 1PAD + \beta 2DAU + \beta 3DAK + \beta 4BM + e$

Dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

BM = Belanja Modal

E = Error

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu Y= -0,141 + 0,484X1 + 0,386X2 +0,146X3

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a. a= Kontanta sebesar -0,141 Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa, apabila Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak mengalami perubahan (konstan) = 0, maka besarnya keputusan Belanja Modal sebesar -0,141 satuan

b. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,484 Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 0,484satuan, dapat diartikan bahwa apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan ada perubahan pada Belanja Modal (Y) sebesar 0,484 satuan dengan arah yang berbeda, sedangkan variabel bebas lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

c. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 0,386 Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (X2) adalah 0,386satuan, dapat diartikan bahwa apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), maka akan ada perubahan pada Belanja Modal (Y) sebesar 0,541 satuan dengan arah yang sama, sedangkan variabel bebas lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bersifat tetap (kontan).

d.Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0,146 Koefisien

regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (X3) adalah 0,146 satuan, dapat diartikan bahwa apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel Dana Alokasi Khusus (X3) maka akan ada perubahan pada Belanja Modal (Y) sebesar 0,146 satuan dengan arah yang sama, sedangkan variabel bebas lainnya seperti Pendapatan Asli Daerah bersifat tetap (kontan).

Pengujian Hipotesis

Tabel 5

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868[a]	.754	.746	.12388

a. Predictors: (Constant), lx3, lx1, lx2

b. Dependent Variable: ly

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9 diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R-Square) sebesar 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 75,4% dan sisanya yaitu 24,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.7, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial menggunakan uji t yang nilainya akan dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5% sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama penelitian ini adalah PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tabel 4.7 memiliki nilai t hitung sebesar 10,229 > t tabel 1,660 dan nilai *sig* sebesar 0,000. Nilai *sig* (0,000) < (0.05) dengan nilai positf pada angka 0, 484, ini berarti variabel PAD signifikan dan positif pada level 5% dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

b. Hipotesis kedua penelitian ini adalah DAU berpengaruh signifikan positif terhadap DAU Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tabel 4.7 memiliki nilai t hitung sebesar 3,078 < t tabel 1,660 dan nilai *sig* sebesar 0,003. Nilai *sig* (0,003) < (0.05) dengan nilai positif pada angka 0,386, ini berarti variabel DAU signifikan dan Positif pada level 5% dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh signifikan Positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

c. Hipotesis ketiga penelitian ini adalah DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tabel 4.7 memiliki nilai t hitung sebesar 2,381 > t tabel 1,660 dan nilai *sig* sebesar 0,019. Nilai *sig* (0,019) < (0.05) dengan nilai positif pada angka 0,019, ini berarti variabel DAK signifikan dan positiff pada level 5% dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel DAK secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015. Dengan demikian hipotesis kedua (H3) diterima.

Uji Simultan (Uji f)

Berikut hasil pengujian secara simultan menggunakan uji F yang nilainya akan dibandingkan dengan signifikansi 0,05 atau 5%.

Tabel 6

Hasil Analisis Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.742	3	1.581	103.001	.000[b]
	Residual	1.550	101	.015		
	Total	6.292	104			

a. Dependent Variable: ly

b. Predictors: (Constant), lx3, lx1, lx2

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5% dengan derajat kebebasan (k;n-k-1) df=3;101. Pada tabel F untuk df1 =3, df2=101, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2.695. Diketahui hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 103.001> F_{tabel} (2.695) pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi PAD, DAU dan DAK mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Hasil Pengujian

1.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar 10,229 > t tabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah diterima. Dalam penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula Belanja Modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi dan Ni Luh Supadmi (2014) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dalam penelitian Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiarthi dan Ni Luh Supadmi (2014) juga menyebutkan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi belanja modal.

2.Pengaruh Dana Alokasi Umum Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar 3,078 < t tabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh belanja modal pemerintah daerah diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum

berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.Pengaruh Dana Alokasi Khusus Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah daerah dengan nilai t hitung sebesar 2,381 < t tabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,019 > 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah ditolak. Dalam penelitian ini menunjukkan besaran DAK mempengaruhi secara signifikan belanja modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dalam penelitian Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016)

4.Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pengalokasian belanja modal

Diketahui hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 103.001> F_{tabel} (2.695) pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel - variabel independen yang meliputi PAD, DAU dan DAK mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal sebesar 75,4% dan sisanya yaitu 24,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

berpengaruh signifikan terhadapa pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2013 – 2015.

4. **DAFTAR PUSTAKA**

Ardhany, Pungky.2014. *Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Adana Alokasi Khusus.Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah). Vol. 2 No. 2 Hal. 19-27*

Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 2014- 2015*. Jakarta: CV. Ryan Indah

Debora L, K Debby.2014. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mememnuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan*. Sripsi. Tidak Dipublikasikan. Medan. Universitas HKBP NOMMENSEN

Devi Yanti, Nora.2015. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Universitas Jember

Dwi Eka Rini Sugiarthi, Ni Putu. Dan Supadmi, Ni luh. *Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemodrasi. Vol. 7 No. 5 Hal. 477-495*

Mardisimo.2009.*Akuntansi Sector Public*. Yogyakarta: Andi

Murdiati, Dra. Sri, M.Si. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*.

Megawati Sularno, Fitria. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Naskah Publikasi. Universitas Widyatama.

Noordiawan, Deddi, Dkk. 2010. *Edisi 2 Akuntansi Sector Public*. Jakarta: Salemba Empat

Noordiawan. Deddi.Dkk. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salembva Empat

Panduan Penulisan Karya Ilmiah. 2016..LPPM. Universitas Nusatara PGRI Kediri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan . dan Penerapan Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 Tentang Bagan Akun Standar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah.

Puspita Sari, Rosy Dan Bagus Indrajaya, I Gusti. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung*, Diunduh 15 September 2016

Purnama, Arif.2014.*Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*.Skripsi.Tidak Dipublikasikan.Universitas Jember

Rahma Pasambuna, Siti. *Kinerja Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Mobagu.*

Soleh dan Heru Rochmansjah, Chabib.2010.Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan R&D. Bandung* : CV:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Bandung.Cv.Alfabeta.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Komunisasi*. Bandung.CV.Alfabeta.

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Bandung:CV.Alfabeta.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke 15. Bandung: CV Alfabeta

Permatasari, Dan Titik Mildawati, Isti.2015. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten /Kota Jawa Timur. Vol. 5 No. 1. Hal. 8-16*

Satrya Aprizay Darwanis, Dan Muhammmad Arfan, Yudi.2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh.* Vol. 2 No. 1 Hal.146-148

Undang – Undang Dasar Pasal 18 tahun 1945 tentang Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah